



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TEGUH HADIANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **966723**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.260.000.000**

1. Tanah Seluas 1118 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 960 m2/100 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **435.800.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
24.300.000
2. MOTOR, KAWASAKI DTRACK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
17.500.000
3. MOTOR, HONDA R15M Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
37.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
150.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
207.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **----**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **7.665.297**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **1.703.465.297**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.703.465.297

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.